

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2020

Jl. By Pass Lingasari Komplek Perkantoran Pemkab. Tasikmalaya

Tasikmalaya - Jawa Barat

Telp. (0265)544200 Fax. (0265)546059

e-mail : pa.tasikmalaya@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. By Pass Lingasari Komplek Perkantoran Pemkab Tasikmalaya

Telp. (0265)544200 Fax. (0265)546059

Tasikmalaya - Jawa Barat

e-mail : pa.tasikmalaya@gmail.com

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tasikmalaya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Tasikmalaya. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tasikmalaya, 31 Desember 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

Zaini Rahman, SH., MH.
NIP. 197703012002121006

Daftar Isi

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi..... | ii |
| Pernyataan Tanggung Jawab | iii |
| Ringkasan | 4 |
| I. Laporan Realisasi Anggaran | 6 |
| II. Neraca | 7 |
| III. Laporan Operasional | 8 |
| IV. Laporan Perubahan Ekuitas | 9 |
| V. Catatan atas Laporan Keuangan | 10 |
| A. Penjelasan Umum | 10 |
| A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Tasikmalaya..... | 10 |
| A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan..... | 11 |
| A.3. Basis Akuntansi | 11 |
| A.4. Dasar Pengukuran | 12 |
| A.5. Kebijakan Akuntansi..... | 12 |
| B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran..... | 19 |
| B.1. Pendapatan Negara dan Hibah | 19 |
| B.2. Belanja..... | 20 |
| C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca..... | 24 |
| C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran | 24 |
| C.8. Ekuitas | 26 |
| D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional | 27 |
| D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak..... | 27 |
| D.2. Beban Pegawai | 27 |
| D.3. Beban Persediaan | 27 |
| D.4. Beban Barang dan Jasa..... | 28 |
| D.5. Beban Pemeliharaan | 29 |
| D.6. Beban Perjalanan Dinas | 29 |

| | | |
|-------|---|----|
| D.7. | Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 30 |
| D.8. | Beban Bantuan Sosial..... | 31 |
| D.9. | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 31 |
| D.10. | Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih | 32 |
| D.11. | Beban Lain-lain..... | 33 |
| D.12. | Kegiatan Non Operasional | 33 |
| D.13. | Pos Luar Biasa | 34 |
| E. | Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas..... | 35 |
| E.1. | Ekuitas Awal | 35 |
| E.2. | Surplus (defisit) LO | 35 |
| E.3. | Koreksi Nilai Persediaan..... | 35 |
| E.4. | Koreksi Aset Tetap | 36 |
| E.5. | Koreksi atas Beban..... | 36 |
| E.6. | Koreksi atas Pendapatan..... | 36 |
| E.7. | Ekuitas Akhir..... | 37 |
| E. | Pengungkapan Penting Lainnya | 37 |
| F.1. | Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca | 37 |
| F.2. | Pengungkapan Lain-lain | 37 |
| F. | Rincian nilai perolehan, Akumulasi nilai penyusutan dan Nilai buku aset tetap Pengadilan Agama Tasikmalaya..... | 38 |

Pengadilan Agama Tasikmalaya

Jl. By Pass Lingasari Komplek Perkantoran Pemkab Tasikmalaya

Tasikmalaya - Jawa Barat

Telp. (0265) 544200 Fax. (0265) 546059

e-mail : pa.tasikmalaya@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tasikmalaya yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tasikmalaya telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tasikmalaya, 31 Desember 2020

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,

Zaini Rahman, SH., MH.

NIP. 197703012002121006

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 31 Desember 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 585.695.000 atau mencapai 217,77 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 268.948.000 .

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 221.980.000 atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.221.980.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2020 dan TA 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp 558.415, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 558.415 ; Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.558.415 dan Rp.0.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp585.695.000 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 232.701.568 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 352.993.432. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa

masing-masing surplus sebesar Rp. 2.883,- dan surplus(defisit) sebesar Rp. 0,- sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. 352.996.315.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp. 0 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. 352.996.315 , kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. (352.437.900) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp. 558.415 .

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2020 DAN TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | Catatan | 31 Desember 2020 | | | TA 2019 |
|----------------------------------|---------|--------------------|--------------------|---------------|-----------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| PENDAPATAN | | | | | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | B.1 | 268.948.000 | 585.695.000 | 217,77 | 0 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 268.948.000 | 585.695.000 | 217,77 | 0 |
| BELANJA | | | | | |
| Belanja Pegawai | B.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belanja Barang | B.4 | 221.980.000 | 221.980.000 | 100 | 0 |
| Belanja Modal | B.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH BELANJA | | 221.980.000 | 221.980.000 | 100 | 0 |

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
NERACA
PER 31 Desember 2020 DAN TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

| URAIAN | Catatan | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|------------------|
| ASET | | | |
| Aset Lancar | | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | C.1. | 0 | 0 |
| Persediaan | | 558.415 | 0 |
| Jumlah Aset Lancar | | 558.415 | 0 |
| Aset Tetap | | | |
| Tanah | C.2. | 0 | 0 |
| Peralatan dan Mesin | C.3. | 0 | 0 |
| Aset Tetap Lainnya | C.4. | 0 | 0 |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | C.5. | 0 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | C.6. | 0 | 0 |
| Jumlah Aset Tetap | | 0 | 0 |
| JUMLAH ASET | | 558.415 | 0 |
| KEWAJIBAN | | | |
| Kewajiban Jangka Pendek | | | |
| Uang Muka dari KPPN | C.7. | 0 | 0 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | 0 | 0 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | | 0 | 0 |
| EKUITAS | | | |
| Ekuitas | C.8. | 558.415 | 0 |
| Jumlah Ekuitas | | 558.415 | 0 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | 558.415 | 0 |

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2020 DAN TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

| RAIAN | Catatan | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
|--|---------|--------------------|------------------|
| Kegiatan Operasional | | | |
| Pendapatan | | | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya | D.1 | 585.695.000 | 0 |
| Jumlah Pendapatan | | 585.695.000 | 0 |
| Beban | | | |
| Beban Pegawai | D. 2 | 0 | 0 |
| Beban Persediaan | D. 3 | 10.721.568 | 0 |
| Beban Barang dan Jasa | D. 4 | 97.720.000 | 0 |
| Beban Pemeliharaan | D. 5 | 0 | 0 |
| Beban Perjalanan Dinas | D. 6 | 124.260.000 | 0 |
| Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat | D. 7 | 0 | 0 |
| Beban Bantuan Sosial | D. 8 | 0 | 0 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | D. 9 | 0 | 0 |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | D. 10 | 0 | 0 |
| Beban Lain-lain | D. 11 | 0 | 0 |
| Jumlah Beban | | 232.701.568 | 0 |
| Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional | | 352.993.432 | 0 |
| Kegiatan Non Operasional | | | |
| D. 12 | | | |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | 2.883 | 0 |
| Defisit Penjualan Aset Non Lancar | | 0 | 0 |
| Defisit Selisih Kurs | | 0 | 0 |
| Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional | | 352.996.315 | 0 |
| Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa | | | |
| Pos Luar Biasa | | | |
| D. 13 | | | |
| Pendapatan PNB | | 0 | 0 |
| Beban Perjalanan Dinas | | 0 | 0 |
| Beban Persediaan | | 0 | 0 |
| Surplus (Defisit) Laporan Operasional | | 352.996.315 | 0 |

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2020 DAN 2019
(dalam satuan Rupiah)

| URAIAN | Catatan | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
|--|---------|------------------|------------------|
| EKUITAS AWAL | E. 1 | 0 | 0 |
| Surplus (Defisit) Laporan Operasional | E. 2 | 352.996.315 | 0 |
| Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar | | | |
| Lain-lain | | | |
| Koreksi Nilai Persediaan | E. 3 | 0 | 0 |
| Koreksi Aset Tetap | E. 4 | 0 | 0 |
| Koreksi Atas Beban | E. 5 | 0 | 0 |
| Koreksi Atas pendapatan | E. 6 | 0 | 0 |
| Koreksi Lain-lain | | 0 | 0 |
| Jumlah Lain-lain | | 0 | 0 |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | | (352.437.900) | 0 |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS | E. 7 | 558.415 | 0 |
| Ekuitas Akhir | E. 8 | 558.415 | 0 |

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Tasikmalaya

Visi Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020 - 2024 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja.

Program dan kegiatan Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tahun 2020 sampai dengan 2024 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Agama Tasikmalaya.

Visi Mahkamah Agung adalah *"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG"*, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Kemudian visi dan misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai visi dan misinya. Visi Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah *" Terwujudnya Badan Peradilan Yang Bersih, Berwibawa dan Bermartabat "*

Misi Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah Misi Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah:

1. Menjaga Kemandirian sebagai Lembaga Peradilan;
2. Memberikan pelayanan yang prima dan berkeadilan kepada para pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan, kredibilitas dan tranparansi peradilan;
4. Mewujudkan pelaksanaan manajemen peradilan yang baik dan benar serta modern;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang hukum sesuai dengan tupoksi;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Tasikmalaya melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
|------------------|---|------------|
| Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo | 0.5% |
| Kurang Lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan | 10% |
| Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan | 50% |
| Macet | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN | 100% |

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2015 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Tabel Masa Manfaat

| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat |
|--|------------------|
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d. 20 tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5 s.d. 40 tahun |
| Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern) | 4 tahun |

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga,

Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2020 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :Rp.
585.695.000*

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 585.695.000 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara Bukan Pajak yang diterima oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 2 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

| No. | Uraian | Estimasi Pendapatan | Realisasi | % |
|-----|--|------------------------|--------------------|---------------|
| 1. | Pendapatan Ongkos Perkara | 126.760.000 | 171.300.000 | 135,14 |
| 2. | Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan) | 17.994.000 | 60.130.000 | 334,17 |
| 4. | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | 124.194.000 | 354.265.000 | 285,25 |
| 5. | Pendapatan Pengesahan Surat DibawahTangan | 0 | 0 | 0 |
| | Total Pendapatan | 268.948.000 | 585.695.000 | 217,77 |

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp.585.695.000 atau 0 persen dibandingkan TA 2019.

Perbandingan realisasi PNBP 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

| No. | Uraian | 31 Desember 2020 | TA 2019 | Perubahan | |
|-------------------------|--|---------------------|----------|--------------------|-------------|
| | | | | Rp. | % |
| 1. | Pendapatan Ongkos Perkara | 171.300.000 | 0 | 171.300.000 | 0 |
| 2. | Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan) | 60.130.000 | 0 | 60.130.000 | 0 |
| 4. | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | 354.265.000 | 0 | 354.265.000 | 0 |
| 5. | Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Pendapatan | | 585.695.000 | 0 | 585.695.000 | 8,41 |

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara :
Rp.
221.980.
000

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Tasikmalaya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 221.980.000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 100% dari anggaran senilai Rp. 221.980.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

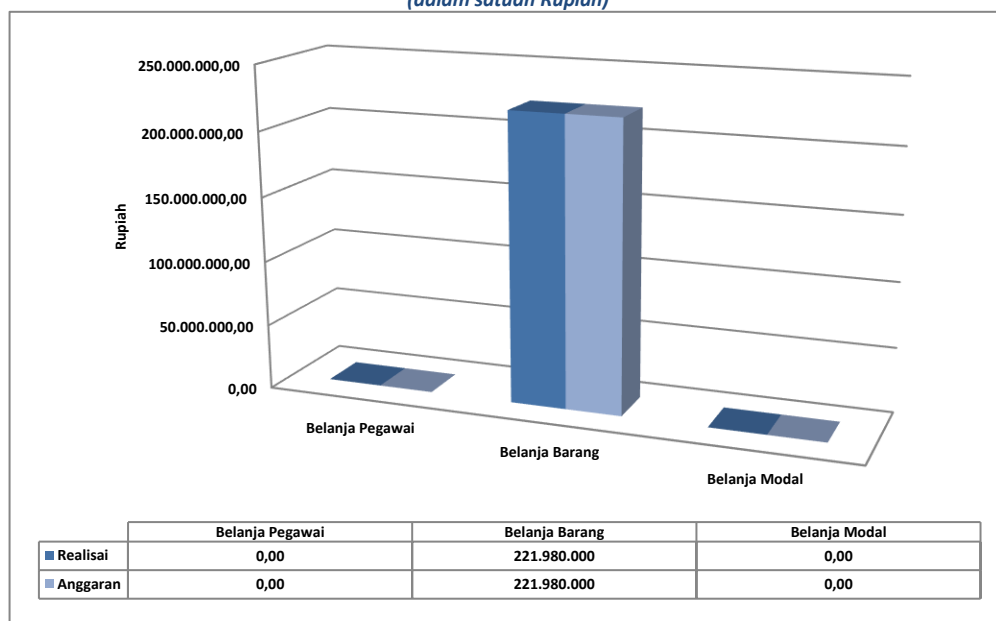
Tabel 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | 31 Desember 2020 | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | Pagu | Realisasi | % |
| Belanja Pegawai | 0 | 0 | 0 |
| Belanja Barang | 221.980.000 | 221.980.000 | 100 |
| Belanja Modal | 0 | 0 | 0 |
| Total Belanja Bruto | 221.980.000 | 221.980.000 | 100 |

| | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------|
| Pengembalian Belanja | | 0 | 0 |
| Total Belanja Netto | 221.980.000 | 221.980.000 | 81,55 |

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) 2020

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 221.980.000 atau sebesar 0% dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. **Penurunan tersebut disebabkan karena pagu DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan pagu DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019. Kenaikan tersebut disebabkan karena penambahan pagu pada TA 2020.**

Perbandingan realisasi belanja 31 Desember 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | 31 Desember 2020 | TA 2019 | Naik (Turun) | |
|-----------------|------------------|---------|--------------|---|
| | | | Rp. | % |
| Belanja Pegawai | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| Belanja Barang | 221.980.000 | 0 | 0 | 0 |
| Belanja Modal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Belanja | 221.980.000 | 0 | 0 | 0 |

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai
: Rp. 0

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Tasikmalaya per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 7 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2020 | TA 2019 | Naik(Turun) | % |
|--------------------------------|----------|----------|-------------|----------|
| Belanja Gaji dan Tunjangan PNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belanja Lembur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Belanja Brutto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengembalian Belanja Pegawai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Belanja Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |

B.4. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang :
Rp.
221.980.
000

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Tasikmalaya per 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 221.980.000 dan Rp. 0. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 221.980.000 atau sebesar 0% dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2019.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | 31 Desember 2020 | TA 2019 | Perubahan | |
|--------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|----------|
| | Realisasi | Realisasi | Rp. | % |
| Belanja Barang Operasional | 10.721.000 | 0 | 10.721.000 | 0 |
| Belanja Barang Non Operasional | 124.260.000 | 0 | 124.260.000 | 0 |
| Belanja Jasa | 97.720.000 | 0 | 97.720.000 | 0 |
| Total Belanja Brutto | 221.980.000 | 0 | 221.980.000 | 0 |

| | | | | |
|----------------------|-------------|---|-------------|---|
| Pengembalian Belanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Belanja Netto | 221.980.000 | 0 | 221.980.000 | 0 |

B.5. Belanja Modal

*Realisasi
Belanja
Modal
:Rp. 0*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Tasikmalaya per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 9 Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2020 | TA 2019 | Perubahan | |
|--------------------------------------|---------|---------|-----------|---|
| | | | Rp. | % |
| Belanja Modal Gedung dan Bnagunan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Belanja Brutto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengembalian Belanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Belanja Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| Saldo per 31 Desember 2020 | 0 |
| Mutasi Tambah | |
| | |
| Mutasi Kurang | |
| | |
| Saldo per 31 Desember 2020 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020 | 0 |
| Nilai Buku 31 Desember 2020 | 0 |

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.4. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp. 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| Saldo per 31 Desember 2019 | 0 |
| Mutasi Tambah | |
| | |
| Mutasi Kurang | |
| | |
| Saldo per 31 Desember 2020 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020 | 0 |
| Nilai Buku 31 Desember 2020 | 0 |

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.5. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi
dalam Pengerjaan:
Rp. 0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

C.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan
Aset tetap :
Rp.0

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing Rp. 0,- dan Rp.0,-.

Tabel 12 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

| No. | Uraian | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
|--------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|------------|
| 1 | Peralatan dan Mesin | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jalan , Irigasi, dan Jaringan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aset Tetap Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 0 | 0 | 0 |

C.7. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka
dari KPPN:
Rp.1 7.000.000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Adapun rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Rincian Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2020 | TA 2019 |
|---------------------|---------|---------|
| Uang Muka dari KPPN | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 |

C.8. Ekuitas

Ekuitas:
Rp.
12.883.990

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp12.883.990 dan Rp. 0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP : Rp.
585.695.000*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 585.695.000 dan Rp. 0. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 36 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

| No. | Uraian | TA 2020 | TA 2019 | % |
|-------------------------|--|--------------------|----------|----------|
| 6. | Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Pendapatan Ongkos Perkara | 171.300.000 | 0 | 0 |
| 8. | Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan) | 60.130.000 | 0 | 0 |
| 10. | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | 354.265.000 | 0 | 0 |
| 11. | Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan | 0 | 0 | 0 |
| Total Pendapatan | | 585.695.000 | 0 | 0 |

D.2. Beban Pegawai

Tidak terdapat anggaran belanja pegawai pada satuan kerja Pengadilan Agama Tasikmalaya.

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan :
Rp.0*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 10.721.568,- dan Rp. 0,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2020 | TA 2019 | Naik(Turun) | % |
|--|-------------------|----------|-------------|------------|
| Beban Persediaan Konsumsi | 10.721.568 | 0 | 0 | 100 |
| Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Persediaan Suku Cadang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Persediaan Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beban Persediaan | 10.721.568 | 0 | 0 | 100 |

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa :
Rp.49.204.000*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 221.980.000 dan Rp. 0. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2020 | TA 2019 | Naik(Turun) | % |
|---|--------------------|----------|-------------|------------|
| Beban Barang Non Operasional Lainnya | 50.720.000 | 0 | 0 | 100 |
| Beban Barang Operasional lainnya | 124.260.000 | 0 | 0 | 100 |
| Beban Jasa Konsultan | 47.000.000 | 0 | 0 | 100 |
| Beban Jasa Pos dan Giro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Jasa Profesi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Jasa Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beban Jasa | 221.980.000 | 0 | 0 | 100 |

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp.0*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2020 | TA 2019 | Naik(Turun) | % |
|--|----------|----------|-------------|----------|
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Pemeliharaan lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beban Pemeliharaan | 0 | 0 | 0 | 0 |

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp.119.150.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.124.260.000,- dan Rp.0,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2020 | TA 2019 | Naik(Turun) | % |
|---|--------------------|----------|--------------------|------------|
| Beban Perjalanan Biasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Perjalanan Dinas dalam Kota | 124.260.000 | 0 | 124.260.000 | 100 |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beban Perjalanan Dinas | 124.260.000 | 0 | 124.260.000 | 100 |

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp.0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2020. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2020 | TA 2019 | Naik(Turun) | % |
|--|----------|----------|-------------|----------|
| Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 |

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp.0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2020 | TA 2019 | Naik(Turun) | % |
|--|----------|----------|-------------|----------|
| Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beban Bantuan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 |

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp.0

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2020 | TA 2019 | Naik(Turun) | % |
|---|---------|---------|-------------|---|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Penyusutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Amortisasi Aset tak Berwujud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Penyusutan Aset lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|
| Jumlah Amortisasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beban Penyusutan dan Amortisasi | 0 | 0 | 0 | 0 |

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp.0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

| Uraian | TA 2020 | TA 2019 | Naik(Turun) | % |
|--|---------|---------|-------------|---|
| Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih | 0 | 0 | 0 | 0 |

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp.0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain
per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

| Uraian | TA 2020 | TA 2019 | Naik(Turun) | % |
|---------------------------------|----------|----------|-------------|----------|
| Beban Aset Ekstrakomptabel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peralatan dan Mesin | | | | |
| Beban Aset Ekstrakomptabel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gedung dan Bangunan | | | | |
| Beban Aset Ekstrakomptabel Aset | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tetap Lainnya | | | | |
| Total Beban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 |

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non Operasional
: Rp.0*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

| Uraian | TA 2020 | TA 2019 | Naik(Turun) | % |
|-----------------------------------|---------|---------|-------------|---|
| Surplus Penjualan Aset Non Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penjualan Alat Angkut Darat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defisit Penjualan Aset Non Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penjualan Alat Kantor | | | | |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|---|

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp.0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

| Uraian | TA 2020 | TA 2019 | Naik (Turun) | % |
|-----------------------------|----------|----------|--------------|----------|
| Pendapatan PNB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Perjalanan Dinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Persediaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Pos Luar Biasa | 0 | 0 | 0 | 0 |

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan TA2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-
Rp. 0

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO : Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 352.996.315 dan Rp. 0. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.
Rp. 29.418.500

E.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan : Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

| Uraian | Koreksi |
|---------------------------------------|----------|
| Barang Konsumsi | 0 |
| Suku Cadang | 0 |
| Barang Persediaan Lainnya | 0 |
| Total Koreksi Nilai Persediaan | 0 |

E.4. Koreksi Aset Tetap

*Koreksi Aset
Tetap : Rp.0*

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

E.5. Koreksi atas Beban

*Koreksi Aset
Beban : Rp.0*

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Rincian untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 50 Rincian Koreksi atas Beban
per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

| Uraian | Koreksi |
|---------------------------------|----------|
| Beban Pegawai | 0 |
| Beban Jasa | 0 |
| Total Koreksi atas beban | 0 |

E.6. Koreksi atas Pendapatan

*Koreksi atas
Pendapatan :
Rp.0*

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 51 Rincian Koreksi atas Pendapatan
per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

| Uraian | Koreksi |
|---------------------------|---------|
| Pendapatan Jasa Pelatihan | 0 |
| Pendapatan Lainnya | 0 |

E.7. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 558.415,- dan Rp. 0,-.
Rp.558.415

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. Dengan adanya keputusan tersebut, maka Pengelola Keuangan DIPA PA Tasikmalaya.

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran : Zaini Rahman,SH., MH.
Pejabat Penanda Tangan SPM : Idris Sudrajat, SH.I
Bendahara Pengeluaran : Mamat Rakhmat, SH.I

Menjadi

Kuasa Pengguna Anggaran : Zaini Rahman,SH., MH.
Pejabat Penanda Tangan SPM : Hj. Nuraeni, SH.
Bendahara Pengeluaran : Mamat Rakhmat, SH.I

Pengadilan Agama Tasikmalaya
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020

| No. | Aset Tetap | Masa Manfaat | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
|-----|---|--------------|-----------------|----------------------|------------|
| A. | Peralatan dan Mesin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. | Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. | Aset Tetap Lainnya | 1 tahun | 12.883.990 | 0 | 12.883.990 |
| E. | Aset Tetap yang Tidak Digunakan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya | | 12.883.990 | 0 | 12.883.990 |

Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.

Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)



Catatan atas
Laporan Keuangan

005

04

0200

690023

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}